

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016), akuntansi pemerintahan adalah aktivitas dengan memberikan jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan pada proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, dalam transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah memiliki standar dalam penyusunannya, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang didalamnya menjelaskan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan mandiri dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, dimana pemerintah daerah memiliki wewenang serta kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan penerimaan daerahnya. Menurut Nurcholis (2007) sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor dalam terciptanya otonomi daerah yang mandiri dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD maka daerah tersebut akan semakin mandiri sehingga dapat mengambil keputusan dan membuat kebijakan pembangunan (Sari, 2013).

Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016 yang diperoleh dari data keuangan daerah pada web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2007-2016



Sumber: Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai indikator tingkat kemandirian suatu daerah. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa PAD DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah pusat berkurang setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui hal-hal yang mempengaruhi peningkatan PAD DKI Jakarta. Data keuangan daerah pada web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan penanaman modal asing (PMA) terbesar pada hotel berbintang sebesar 56 persen. Pada bulan Januari-September 2016 dari total investasi pariwisata senilai 594,59 juta dollar Amerika Serikat (AS), sektor perhotelan mencapai 333 juta dollar AS. Investasi tersebut didominasi oleh Singapura sebesar 51 persen. Sedangkan British Virgin Islands sebesar 14 persen, dan Luxemburg

sebesar 8 persen. Hal ini berarti realisasi investasi pada sektor pariwisata meningkat 23 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.094 juta dollar AS. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) Januari-September 2016 sebesar 139,06 juta dollar AS dengan sektor perhotelan yang didominasi diminati investor dalam negeri. Dengan rincian, untuk hotel berbintang sebesar 65 persen, wisata tirta 21 persen, kegiatan taman bertema/hiburan 4 persen (Kompas, 2016).

Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013 dari sektor pariwisata mengalami peningkatan sebesar 60 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan domestik DKI Jakarta tahun 2013 mencapai 31.646.700 orang, yakni meningkat 9,12 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 28.800.000 orang (Kompas, 2014).

Belanja modal suatu daerah menjadi salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakatnya. Melalui peningkatan prasarana yang dibangun oleh pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakat maka masyarakat akan menikmatinya dengan nyaman dan rela membayar retribusi atas fasilitas yang dinikmati tersebut. Sehingga melalui peningkatan kualitas layanan publik tersebut maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Datu dalam Ririn, Prihatni, dan Murdayanti, 2014).

Dalam meningkatkan prasarana publik untuk masyarakat tentu membutuhkan modal yang besar maka dapat memanfaatkan potensi daerah dalam menarik investor yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kemampuan daerah dalam

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, salah satunya bergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan (Utami, 2013).

Melalui prasarana publik yang telah dibangun sehingga menciptakan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi seperti Provinsi DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia yang memiliki tempat bersejarah serta tempat wisata menarik melalui sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Sektor penting dalam membangun dan mengembangkan suatu wilayah adalah sektor pariwisata, karena sektor pariwisata dapat menambah pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat (Suartini, dan Utama, 2013). Proses perkembangan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan. Dengan proses perkembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wijaya, dan Djayastra, 2014). Hal ini dikarenakan jika para wisatawan berwisata disuatu daerah maka akan memerlukan barang dan jasa dalam memenuhi kegiatan konsumtif wisatawan. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Widyaningsih, dan Budhi, 2014). Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wulandari, dan Ayuningsasi, 2014).

Belanja modal merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan pendapatan asli suatu daerah. Darwanis dan Saputra (2014) menyebutkan pada penelitiannya ada pengaruh positif belanja modal terhadap PAD yang disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah maka masyarakat dapat menikmati untuk menjalankan produktifitas pekerjaannya sehingga

masyarakat akan membayar pajak dan retribusi dalam menikmati infrastruktur yang akan meningkatkan PAD.

Namun belanja modal berpengaruh negatif terhadap PAD dalam penelitian Ristani, Darmawan, dan Anantawikrama (2015) yang disebabkan oleh pemanfaatan alokasi belanja modal dalam hal pelayanan publik maupun dalam meningkatkan pariwisata yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangli belum maksimal.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat dipengaruhi oleh investasi, seperti pada penelitian Wulandari dan Ayuningsasi (2014) adanya pengaruh positif Investasi terhadap PAD, disebabkan oleh Provinsi Bali yang dikenal dengan sektor pariwisatanya yang menarik sehingga menarik wisatawan untuk menikmati daerah tersebut, sehingga meningkatkan perekonomian yang berdampak pada bertambahnya jumlah investasi serta meningkatkan PAD Provinsi Bali.

Sedangkan pada penelitian Utami (2013) yang menjelaskan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap PAD yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya, karena tidak setiap tahun menyertakan modalnya berupa investasi kepada Bank Jabar Banten melainkan bergantung pada kebijakan kepala daerah tersebut. Dengan minimnya penyertaan modal maka tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk PAD.

Terdapat pula penelitian yang meneliti jumlah wisatawan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Suartini dan Utama (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah wisatawan terhadap PAD.

Pengaruh positif tersebut disebabkan oleh potensi adat istiadat dan kesenian di Kabupaten Gianyar yang dapat diandalkan sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gianyar.

Sedangkan dalam penelitian Purwanti dan Dewi (2014) menjelaskan pengaruh negatif antara jumlah wisatawan terhadap PAD dimana pengaruh negatif tersebut disebabkan oleh kawasan wisata pacet yang dilanda hujan deras yang menimbulkan banjir bandang dan pengelolaan objek wisata Museum Trowulan yang kurang baik sehingga menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan di Kota Mojokerto.

Kemajuan suatu daerah tentu dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerahnya karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menjabarkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hotel dan restoran di Provinsi Bali yang merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PDRB.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu. Belanja modal memiliki pengaruh yang berbeda terhadap PAD pada penelitian terdahulu dimana dalam penelitian (Darwanis dan Saputra, 2014) menjelaskan terdapat pengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif pada penelitian (Ristani, Darmawan, dan Anantawikrama, 2015).

Selain belanja modal terdapat faktor lain yang mempengaruhi PAD yakni investasi yang pada penelitian terdahulu adanya pengaruh positif antara investasi

terhadap PAD pada penelitian (Wulandari dan Ayuningsari, 2014), sedangkan dalam penelitian (Utami, 2013) menjelaskan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap PAD.

Adapun penelitian yang meneliti pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD dalam penelitian (Suartini, dan Utama, 2013) dengan hasil pengaruh positif jumlah wisatawan terhadap PAD, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, dan Dewi, 2014) yang dijelaskan pada penelitiannya dengan hasil pengaruh negatif jumlah wisatawan terhadap PAD. Serta adapun pengaruh produk domestik regional bruto terhadap PAD dengan hasil pengaruh positif dalam penelitian (Sari, 2013).

Dengan adanya perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu maka pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya dengan maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Melalui pengelolaan tersebut tentu memerlukan informasi mengenai potensi PAD yang dimiliki oleh daerah tersebut, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi PAD (Suartini, dan Utama, 2013).

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI, JUMLAH WISATAWAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk memberikan konfirmasi terkait dengan pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Apakah Investasi berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
3. Apakah Jumlah Wisatawan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang dibahas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meneliti adanya pengaruh yang diberikan oleh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.
2. Meneliti adanya pengaruh yang diberikan oleh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.
3. Meneliti adanya pengaruh yang diberikan oleh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

4. Meneliti adanya pengaruh yang diberikan oleh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal yang berkaitan dengan Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

Dapat menjadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan realisasi Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.